

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

DR. Sefli Diana Roza, SE.MM (Ketua)

NIDN 0017097303

Sinarni (Anggota)

NIM 171000461201048

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
MARET 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Kasus Pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung)**

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : **Sefli Diana Roza, SE.MM**

NIDN : **0017097303**

Jabatan Fungsional : **Lektor**

Program Studi : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi**

Nomor HP : **08126757380**

Alamat surel (e-mail) :

Anggota Tim

Nama Lengkap : **Sinarni**

NIDN : **171000461201048**

Perguruan Tinggi : **Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**

Tahun Pelaksanaan : **2018-2019**

Sumber Dana : **Mandiri**

Biaya Tahun Berjalan : **Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

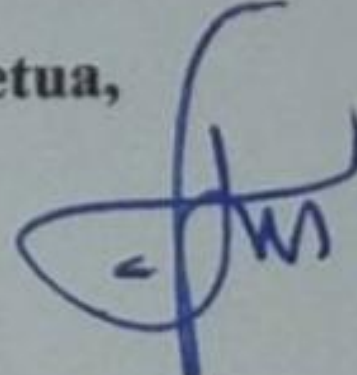
Biaya Keseluruhan : **Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**


1984
Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi

DEKAN
(Juita Sukraini, SE.M.Si)
NIDN 1017116201

Solok, 07 Maret 2019

Ketua,



(Sefli Diana Roza, SE.MM)

NIDN 0017097303


Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE, MM)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

RINGKASAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TINJAUAN PUSTAKA**
- 3. METODE**
- 4. JADWAL**
- 5. DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.(2)Untuk mengetahui pengaruh Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung. (3) Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas kinerja instansi di Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) studi kepustakaan (2) mengakses web dan situs lainnya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sumber data sekunder. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Kata kunci maksimal 5 kata

Clarity of Budget Objectives, Reporting System and Agency Performance Accountability

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajiban pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat.

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul “Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung”.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja adalah kemampuan kinerja mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk tiga maksud yaitu (Mardiasmo, 2015) :

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup dua hal yaitu : unsur keberhasilan yang dapat diukur (*output*) dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan (*outcome*). Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (*target kinerja*) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan.

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Fathia (2017) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun prosedur komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu.

Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan pemerintah sebagai manajer dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PSAP Kerangka Konseptual,

2014). Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan capaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP.

Menurut LAN dan BPKP (2013) menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini membuktikan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang baik khususnya dalam pengambilan keputusan. Sistem pelaporan ini dapat diukur menjadi 3 dimensi, yaitu :

- a. Tingkat Kepatuhan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku
- b. Tingkat Efisien dan Efektifitas. Efektifitas adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Efisiensi merupakan anggapan bahwa tujuan yang telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara terbaik dalam mewujudkan tujuan tersebut. Efisiensi hanya bisa dievaluasi dengan penilaian relatif atau membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini diharapkan sistem pelaporan yang dilakukan tepat waktu.
- c. Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan secara lengkap terdiri dari :
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas

- Catatan atas Laporan Keuangan

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui gambaran secara lebih jelas mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung. Sedangkan bentuk penelitian adalah Penelitian Kausal (sebab akibat) dimana ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung yaitu 8 lembaga teknis daerah. Responden yang dipilih hanya pegawai yang bertugas di bagian keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) 1 orang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang dan Bendahara 1 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiyono (2012). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Total sampling*, yaitu seluruh populasi menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 32 orang.

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) studi kepustakaan, 2) mengakses web dan situs lainnya, 3) merumuskan dan menganalisis data yang didapatkan ke program olah data, 4) mengolah data, 5) melakukan analisis data sesuai materi, 6) penyusunan laporan penelitian, 7) menyusun artikel dan publikasi.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anastasia. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelapora terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*, .13, 37-67.
2. Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 28-48.
3. Bulan Rofika. (2011). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197-209.
4. Auditya, L. dan Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
5. Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
6. Chintya. (2015). Pengaruh Pemanfaataan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. *Artikel*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Darwanis, Haspiarti. (2013). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare). *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar.
8. Fatmala, Apriadi, (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. <http://aapapriadi.blogspot.com/2011/09/pengaruh-kejelasan-sasaran-anggaran-dan.html>

9. Fathia, Herawaty. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi Vol.13.Jambi*.
10. Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
11. Hidayatullah, A. dan Herdjiono, I. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Prosiding*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
12. Kurnis, Kusmaningrum. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Megister Akuntansi Universitas Diponegoro.
13. Lembaga Administrasi Negara. (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
14. Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
15. Nasir, A. dan Oktari, R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi.Universitas Riau*, 19(02).



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No 27/ST-P/LP3M-UMMY/III-2019

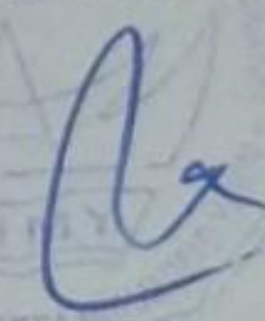
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Sefli Diana Roza, SE, MM
NIDN : 0017097303
Pangkat/Golongan Ruang : Lektor III/d
Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul "Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Lembaga Teknik Pemerintah Kabupaten Sijunjung", Pada Tahun Akademik 2020/2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Solok, 07 Maret 2019
Kepala LP3M UMMY



DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402